



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Wacana Pansus Pemilu Dibahas di DPR
Tanggal	: Kamis, 09 Mei 2019
Surat Kabar	: Republika
Halaman	: 3

Wacana Pansus Pemilu Dibahas di DPR

● FEBRIANTO ADI SAPUTRO
DIAN ERIKA NUGRAHENY

JAKARTA — Sejumlah interupsi terkait wacana pembentukan panitia khusus pemilu mewarnai pembukaan masa persidangan V Tahun 2018-2019 DPR. Sejumlah fraksi mengajukan interupsi pro dan kontra terkait wacana yang sempat dilontarkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon beberapa waktu lalu. Bahkan, interupsi langsung mengejutkan setelah sidang dibuka pimpinan sidang Fadli Zon.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra menjadi fraksi yang mengajukan dukungan terhadap pembentukan pansus pemilu. Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah menilai, Pemilu 2019 menyisakan beragam persoalan. PKS mendesak agar DPR membentuk pansus terkait pelaksanaan Pemilu 2019. "Karena itu, Fraksi PKS mengajak seluruh anggota DPR untuk bentuk pansus tentang penyelenggaran pemilu agar semua evaluasi dilakukan dengan baik, bisa menyelidiki kematian KPPS, salah input dan evaluasi penyelenggaraan pemilu, evaluasi kebijakan UU Pemilu serentak, evaluasi akuntabilitas KPU atas Pemilu 2019 menjadi langkah yang perlu kita lakukan," kata Ledia saat sidang paripurna DPR, Rabu (9/5).

Menurut dia, DPR memiliki fungsi pengawasan berhak untuk bertanya dan memiliki hak kelembagaan berupa hak angket serta hak interpelasi. "Terkait persoalan pemilu tersebut kami memandang perlu hak angket DPR RI yang kemudian dilanjutkan dengan

pembentukan pansus penyelenggara Pemilu 2019," ujarnya. Anggota Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Sutarko juga mengaku prihatin dengan berbagai laporan kecurangan yang terjadi pada pemilu kali ini. "Kami tegaskan kami dari Fraksi Gerindra mendukung adanya pembentukan pansus pemilu," tuturnya.

Namun, dukungan ini langsung ditutup sejumlah fraksi partai koalisi pemerintah. Politikus Partai Nasdem Johnny G Plate menilai, DPR lebih baik menunggu hasil rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga selesai. "Jika ada yang menyebutkan telah terjadi kecurangan yang masif, itu merupakan keputusan atau pendapat yang sangat prematur," kata Plate dalam interupsinya.

Hal serupa disampaikan politikus PDI Perjuangan Eva Sundari. Ia meminta seluruh pihak menunggu proses pemilu yang hingga saat ini masih berjalan. "Kalau *toh* ada suatu permasalahan, berikan kepada Bawaslu dan MK karena itu mekanisme hukum yang kita sepakati bersama-sama di DPR ini," ujar anggota Komisi XI ini menegaskan.

Selain itu, politikus Partai Golkar Misbakun meminta semua pihak untuk menjadikan bulan Ramadhan sebagai momentum meredakan ketegangan yang ditimbulkan akibat pemilu. Ia juga mengajak semua pihak untuk menyatakan kembali semua kekuatan dengan melakukan upaya-upaya yang konstruktif dengan mendukung siapa pun calon presiden dan legislatif pada periode yang akan datang.

"Saya yakin apa yang terjadi dalam proses pemilu kali ini tidak direkayasa oleh pihak manapun," ujarnya.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) belum menyampaikan posisinya terkait wacana pembentukan pansus pemilu. Ketua Komisi VIII dari Fraksi PAN Ali Taher Parasong mengungkapkan, terkait hal itu masih akan dibicarakan oleh fraksi. "Iya, nanti kita lihat, kita akan dipanggil oleh fraksi untuk membicarakan," kata Ali.

Sidang

Di tempat terpisah, dalam sidang lanjutan gugatan dugaan kecurangan dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan bantahan. Perwakilan Biro Hukum KPU Setya Indra Arifin mengatakan bahwa sistem tersebut dibuat semata untuk keterbukaan informasi pemilu dan tidak ada maksud melakukan kecurangan. Dalam sanggahannya, KPU mengakui pernah ada kesalahan input data.

Kesalahan input yang menyebabkan suara paslon 01 Jokowi-Ma'ruf bertambah serta Prabowo berkurang di suatu TPS sebanyak 38 kekeliruan. Ada pula 21 kekeliruan yang menyebabkan suara Jokowi berkurang serta Prabowo bertambah di TPS yang sama. "Jadi, berdasarkan jenis tersebut jelas bahwa sama sekali tidak benar dan berdasar dalil pelapor yang mengatakan patut diduga ada unsur kesengajaan untuk menaikkan suara paslon 01 dan *down-grade* suara paslon 02," ujarnya.

■ ed: agus raharjo